

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAHAN KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Fatimatuz Zahroh
140810167**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAHAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Fatimatuz Zahroh
140810167**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 09 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan

Materai Rp6.000,00

Fatimatuz Zahroh
140810167

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAHAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh :

**Fatimatuz Zahroh
140810167**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 09 Agustus 2018

Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.

Pembimbing

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah kota batam. Sampel yang digunakan adalah pemerintah kota batam dan badan statistik kota batam periode 2012-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dimana data diperoleh dari laporan realisasi anggaran kota batam dan data kenaikan/ penurunan pertumbuhan ekonomi di kota batam. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastitas. Uji lain yang juga diterapkan dalam penelitian ini adalah uji autokorelasi dan uji pengaruh berupa uji regresi linier berganda, uji hipotesis, uji parsial (t-test), uji simultan (f-test) dan uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal dengan hasil t hitung lebih kecil dari t tabel atau $-11,372 < 1,67252$ dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari α $0,00 < 0,005$, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal dengan hasil t hitung $> t$ tabel atau $16,327 > 1,67252$ dengan nilai signifikansi $0,000$ lebih kecil dari $0,05$, sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan hasil t hitung lebih kecil dari t tabel atau $-0,534 < 1,67252$ dengan nilai signifikansi $0,595$ lebih besar dari $0,05$. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi sebesar $96,3\%$, sedangkan sisanya $3,7\%$ dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the influence of economic growth, local revenue and general allocation fund to capital expenditure at batam city government. The sample used was the city of Batam and the city statistics agency for the period 2012-2016. The method used in this study is a quantitative method. Where the data is obtained from the report of the realization of the city budget of Batam and data on the increase / decrease of economic growth in the city of Batam. The test used in this study is the asu test, the classical includes the normality test, multicolineality test, heteroskedastity test. Other tests also applied in this study are autocorrelation test and influence test in the form of multiple linear regression test, hypothesis test, partial test (t-test), simultaneous test (f-test) and coefficient of determination test. The result of this research mentioned that economic growth influence to capital expenditure with result of t count smaller than t table or $-11,372 < 1,67252$ and significant value smaller than α $0,00 < 0,005$, local revenue influences to capital expenditure with results t count > t table or $16.327 > 1.67252$ with a significance value of 0.000 smaller than 0.05, while general allocation funds have no effect on capital expenditure with t count smaller than t table or $-0.534 < 1.67252$ with value 0.595 significance greater than 0.05. While economic growth, local revenue and general allocation funds simultaneously or together have a significant influence on capital expenditure with a significance value of 96.3%, while the remaining 3.7% is influenced or explained by other variables not included in the model this research.

Keywords: Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Funds and Capital Expenditures

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala nikmat umur, waktu yang telah diberikan selama ini serta melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati sebagai bentuk perubahan untuk lebih baik lagi. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan banyak pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
2. Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus pembimbing skripsi Program Studi Akuntansi di Universitas Putera Batam Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. yang telah memberikan motivasi dan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
3. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah memberikan informasi kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Putera Batam.
4. Terimakasih kepada kedua orang tua, ayah (Sunardi) dan ibu (Siti Lum'atun) serta kakak (Siti Chuzaenatun dan Siti Muflichatun) yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa yang begitu memotivasi penulis yang tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun.
5. Terimakasih kepada Arif Mulyono, yang selalu menemani dan mendukung apapun keputusan penulis.
6. Terimakasih kepada sahabat Fitriani Manalu, Kristiani Siahaan, Esra Roulina Sinaga dan Dwi Ardela yang senantiasa selalu memberikan kritik, motivasi, waktu dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada bapak ABD. Malik, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batam dan Bapak Ahmad Chaidir, S.Si selaku Kepala Seksi IPDS BPS Kota Batam yang telah begitu membantu penulis memudahkan ketersediaan data penelitian.
8. Teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang menjadi sahabat terbaik dalam susah senang sampai akhir menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya.Amin.

Batam, 09 Agustus 2018

Fatimatuz Zahroh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	5
1.4. Rumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1. Apek Teoritis	7
1.6.2. Aspek Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pertumbuhan Ekonomi	9
2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2.2.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
2.2.2. Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	19

2.3. Dana Alokasi Umum.....	20
2.4. Belanja Modal	23
2.1. Penelitian Terdahulu	27
2.2. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Desain Penelitian	31
3.2. Operasional Variabel	33
3.2.1. Variabel Bebas (Independen variabel)	33
3.2.2. Variabel Terikat (Dependent Variable)	35
3.3. Populasi dan Sampel.....	37
3.3.1. Populasi	37
3.3.2. Sampel	37
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	39
3.4.1. Tehnik Pengumpulan Data	39
3.4.2. Alat Pengumpulan Data.....	40
3.5. Metode Analisis Data.....	40
3.5.1. Analisis Deskriptif	41
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	41
3.5.3. Uji Pengaruh	45
3.6. Lokasi dan jadwal Penelitian.....	49
3.6.1. Lokasi	49
3.6.2. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Hasil Penelitian.....	50
4.1.1. Analisis Deskriptif	50
4.1.2. Hasil Uji Asumsi Klasik	52
4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas.....	52
4.1.3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	59
4.1.4. Hasil Uji Hipotesis	63

4.1.5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	65
4.2. Pembahasan.....	66
4.2.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.....	66
4.2.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	67
4.2.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	68
4.2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Belanja Modal	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Desain Penelitian Kuantitatif.....	32
Gambar 4. 1 Histogram.....	53
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas-Normal Probability Plots	54
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	36
Tabel 3. 2 Durbin-Watson.....	44
Tabel 4. 1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian.....	51
Tabel 4. 2 Hasil Uji kolmogorov-smirnov test.....	55
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikonearitas.....	56
Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4. 5 Hasil Uji Analisis Linier Berganda.....	60
Tabel 4. 6 Uji Parsial (T-test).....	63
Tabel 4. 7 Hasil Uji secara Simultan (F-Test).....	64
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	65

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1.	45
-----------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN 2 SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN 3 PENELITIAN TERDAHULU

LAMPIRAN 4 TABULASI DAN HASIL PENGOLAHAN SPSS 22

LAMPIRAN 5 TABEL F dan TABEL t

LAMPIRAN 6 DATA PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Kota Batam melalui peningkatan setidaknya 6 hingga 7 persen per tahun ternyata belum bisa tercapai, Kenyataan yang ada pertumbuhan ekonomi justru berada di bawah rata-rata angka nasional. Sepanjang beberapa tahun belakangan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam kian merosot.

Kota Batam adalah sebuah kota yang dibangun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian barat. Kota Batam dibuka sebagai kota industri dengan mendatangkan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan memberikan banyak keistimewaan pada Kota Batam diharapkan dapat terus mendorong masuknya investasi ke Kota Batam. Banyaknya investasi yang masuk ke Kota Batam, pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tercipta. Maka tidak heran jika kategori usaha paling dominan di Kota Batam adalah industri pengolahan. Industri pengolahan selama kurun waktu 2012-2016 masih mempunyai peranan lebih dari lima puluh persen, meskipun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Peranan kategori industri terbesar pada tahun 2013 dengan peranan hingga 56,71 persen. Kategori usaha yang dominan kedua adalah konstruksi dengan peranan berkisar 18 persen sampai 19 persen. Peranan terbesar ketiga adalah kategori usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil

dan sepeda motor dengan peranan 5 persen sampai 6 persen.

Dampak yang terjadi sekarang adalah tidak stabilnya perputaran perekonomian sehingga mengalami defisit anggaran daerah. Pada tahun 2017 Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam adalah sebesar Rp2,44 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,5 triliun. Terjadi defisit sebesar Rp105,2 miliar. Untuk pembiayaan daerah dan penerimaan sebesar Rp108,26 miliar. Angka tersebut masih terbilang minim, sehingga perlu didorong lagi agar penyerapan belanja modal oleh pemerintah daerah lebih maksimal,

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Untuk mengatasi persoalan terus merosotnya ekonomi dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun, pada

praktiknya, transfer dana yang bersumber dari APBN merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.

PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian lain menyebutkan bahwa Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal (Wandira 2013).

Berdasarkan beberapa referensi dan data penelitian yang ada dilapangan, peneliti menggambarkan data pertumbuhan ekonomi kota batam, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, serta belanja modal di kota Batam, dalam kurun waktu 2012-2016 dalam bentuk tabel.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
2012	7.4	413,178,934,109	429,672,271,000	242,455,787,877
2013	7.18	606,340,450,987	396,629,856,000	353,874,638,873
2014	7.16	779,944,837,451	559,103,958,000	492,747,683,751
2015	6.83	836,713,858,342	529,988,410,000	524,332,531,767
2016	5.45	881,268,969,157	576,930,711,000	637,185,519,952

Berdasarkan pengelompokan variabel diatas, kita dapat melihat kenaikan pertumbuhan ekonomi di Batam selama periode 3 tahun terakhir (2012-2015), namun menurun secara signifikan di tahun 2015 dan 2016 dikarenakan mulai banyaknya perusahaan-perusahaan swasta yang gulung tikar di wilayah Batam, namun untuk

perolehan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum maupun pengeluaran belanja modal daerah terus meningkat.

Beberapa penelitian yang dilakukan seringkali memperoleh hasil yang berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten satu sama lain. Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KOTA BATAM ”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kenaikan belanja modal di kota Batam.
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) untuk peningkatan kenaikan belanja modal di kota Batam.
3. Pentingnya kebutuhan dana alokasi umum (DAU) sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kenaikan belanja modal di kota Batam.
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap beleanja modal di kota Batam.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti hanya akan meneliti menggunakan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Fokus terhadap perkembangan baik kenaikan maupun penurunan perekonomian di Kota Batam selama periode 2012 hingga 2016.
2. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dan penambahan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yang terjadi di Kota Batam selama periode 2012 hingga 2016.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal di Kota Batam?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kota Batam?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di Kota Batam?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yang terjadi di kota Batam?
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yang terjadi di kota Batam?
3. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yang terjadi di kota Batam?

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Apek Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan konseptual dan sebagai kajian untuk memperluas wawasan serta masukan atau referensi yang berkaitan dengan pentingnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap bagaimana pengaruhnya terhadap belanja modal khususnya di wilayah kota Batam.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi pemerintah kota Batam

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat serta

mampu mendorong peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi daerah dan pendapatan asli daerah.

2. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi khususnya di bidang akuntansi dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian serupa pada periode dimasa yang akan datang.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu media untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kegiatan perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat (Sugiarthi and Supadmi 2014). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat (Nurzen and Riharjo 2016).

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Nurzen and Riharjo 2016). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan (Adyatma and Rachmawati Meita oktaviani 2015).

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

- a. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin
- b. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar
- c. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah
- d. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar
- e. Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah

Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah:

1. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Sedangkan langkah

penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern.

2. Mengembangkan infrastruktur, modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik dan jaringan telepon.
3. Meningkatkan tabungan dan investasi, pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat.
4. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh

5. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk mengatasinya pada tahap awal mulai dari pembangunan ekonomi perencanaan pembangunan perlu dilakukan. Melalui perencanaan pembangunan dapat pula ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. PAD yang rendah berarti ketergantungan pada Pemerintah Pusat (dan atau Pemerintah Provinsi) akan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah tingkat II (Kabupaten/Provinsi) (Sinarwati and Yuniarta 2014). Sumber- sumber PAD terdiri dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

2.2.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo 2016:14). Berdasar peraturan pemerintah 65 tahun 2001 pajak yang dipungut pemerintah provinsi berbeda objeknya dengan pajak yang dipungut pemerintah/kota.

Menurut (Mardiasmo 2016:17), pajak sendiri digolongkan menjadi beberapa kelompok :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak sendiri oleh Wajib Pajak & tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal dengan subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak (WP).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri WP.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Sedangkan pajak kabupaten/kota, terdiri dari (Mardiasmo 2016:15) :

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dari bebatuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Retribusi Daerah

Dalam undang-undang peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 retribusi daerah atau yang biasa disebut retribusi, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut (Mardiasmo 2016:19) retribusi ini sendiri terbagi menjadi 3 objek retribusi daerah, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum ini meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;

- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian alat cetak peta;
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedtan kakus;
- k. Retribusi pengolahan limbah cair;
- l. Retribusi palayanan tera/tera ulang;
- m. Retribusi pelayanan pendidikan;
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usahan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a. Retribusi pemakaina kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;

- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi rumah potong hewan;
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- j. Retribusi penyebrangan di air; dan
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek dari retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis dari retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek; dan
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi :

- a. Jenis laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. Jasa giro;
- d. Bunga deposito;
- e. Bunga deposito;
- f. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- g. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
- k. Pendapatan dari pengembalian.

2.2.2. Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah penerimaan PAD dan APBD disebagian besar daerah otonom kabupaten/kota masih relatif kecil. Kekurangan dana anggaran ditutup oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (hasil bagi pajak dan non pajak, DAU, dan DAK). Walaupun penerimaan daerah dan retribusi daerah sampai saat ini masih kecil pemerintah daerah tetap harus berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah.

Menurut (Adisasmita 2011:117) berdasarkan pengalaman selama ini, dapat dikemukakan sebagai upaya yang perlu di tempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah misalnya:

1. Melakukan pendataan secara lengkap dan akurat.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan dan pelaksanaan dibidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antar instansi terkait) dan koordinasi internal (antar bagian/unit dalam instansi).

4. Memperbaiki sistem pengelolaan selain tunggu bola harus pula secara aktif jemput bola.
5. Memberi hadiah kepada wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Pungutan kelembagaan.
7. Meningkatkan rasio cakupan (*coverage ratio*) mendekati potensi.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan.
9. Peningkatan pengawasan melekat, fungsional dan masyarakat.
10. Pemberian dana insentif bagi petugas pemungut yang berprestasi.
11. Pemberian sanksi kepada petugas pajak dan retribusi yang melakukan kesalahan.
12. Melakukan kampanye, antara lain melalui spanduk dan pamphlet.
13. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat.
14. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi dan lainnya.

2.3. Dana Alokasi Umum

Selain pendapatan asli daerah, indikator lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi Umum adalah merupakan

dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, dana alokasi dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan urusan dan prioritas daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk pemerataan dan keadilan secara selaras demi menggilir kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai penyelenggaraan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pembangunan berkelanjutan. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang besar terhadap belanja modal.

Tujuan penting alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal ini terkait karena Dana Alokasi Umum yang mana DAU ini merupakan dana perimbangan yang paling besar yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Suhendra, Adiputra, and Sulindawati 2015).

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Umum
- b. Dana Alokasi Khusus
- c. Dana Bagi Hasil

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah

karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perhitungannya DAU menggunakan formula yang menggunakan beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan.

Ada beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu:

- a. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertikal. Hal ini disebabkan sebahagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.
- b. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
- c. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
- d. Untuk stabilitas ekonomi. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi di saat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

Sedang tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk:

1. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal
2. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal
3. Menginternalisasikan/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat/biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut.
4. Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya

Kaitan antara DAU dengan Belanja Modal merupakan Sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana atau prasarana untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahwa yang membedakan PAD dengan DAU adalah PAD berasal dari uang yang diperoleh daerah itu sendiri, sedangkan DAU berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Susanti and Fahlevi 2016).

2.4. Belanja Modal

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Adyatma and Rachmawati Meita oktaviani 2015).

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (Nurzen and Riharjo 2016). Dalam hal ini aset yang tetap akan memiliki berbagai macam ciri-ciri yang dapat berwujud dengan kata lain ciri-ciri yang ada dalam belanja modal sifatnya dapat terlihat.

Adapun ciri-ciri dari belanja modal meliputi:

1. Berwujud
2. Sifatnya menambah
3. Memiliki manfaat yang lebih dari satu periode
4. Nilainya relatif material

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Rizky, Agustin, and Mukhlis 2016). Dalam hal ini tentu saja belanja modal memiliki kriteria tertentu agar dapat dikatakan sebagai belanja modal. Adapun kriteria tersebut meliputi:

1. Pengeluaran bersifat tetap, menambah aset, menambah masa umur, dan masih dalam kapasitas yang relatif tinggi
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimum kapitalis atas aset tetap suatu pemerintahan
3. Niat dari pembelanjaan tersebut tidak untuk dibagikan

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam

belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

2.1. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan atau dipakai sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Meskipun ada perbedaan objek atau variabel yang diteliti, penelitian tersebut dapat dipakai sebagai gambaran penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan (Sinarwati and Yuniarta 2014) tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah kabupaten Buleleng menunjukkan hasil bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Penelitian terbaru dari penelitian (Pradana 2017) dengan judul Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, Namun untuk Dana Alokasi Umum Memiliki pengaruh yang negatif. Jika DAU naik maka Belanja Modal turun dan sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan (Nuarisa 2013) dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

Penelitian yang dilakukan (Dini Arwati 2013) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian

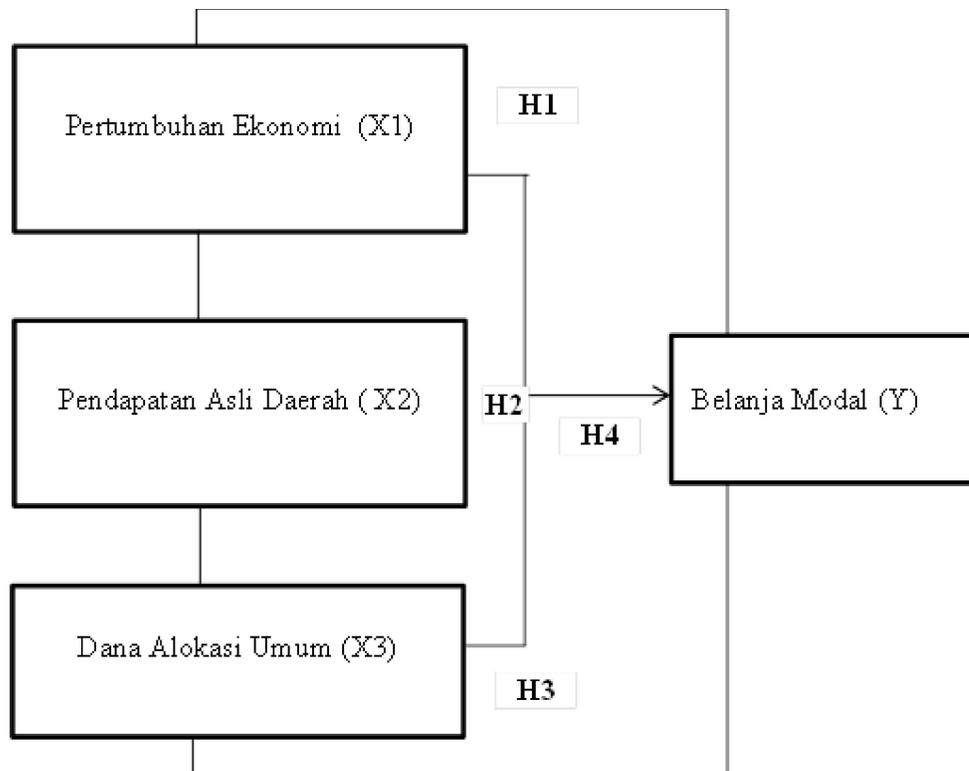
Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan (Wandira 2013) dengan judul Pengaruh PAD, DAK, dan DAU terhadap pengalokasian Belanja Modal menunjukkan hasil DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk tabel didalam lampiran.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Urutan Teori Diatas, agar dapat memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya belanja modal di pemerintahan kota batam.

H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan asli daerah dengan besarnya belanja modal di pemerintahan kota batam.

H3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara dana alokasi umum dengan besarnya belanja modal di pemerintahan kota batam.

H4 : Secara bersama sama terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap besarnya belanja modal di pemerintahan kota batam.

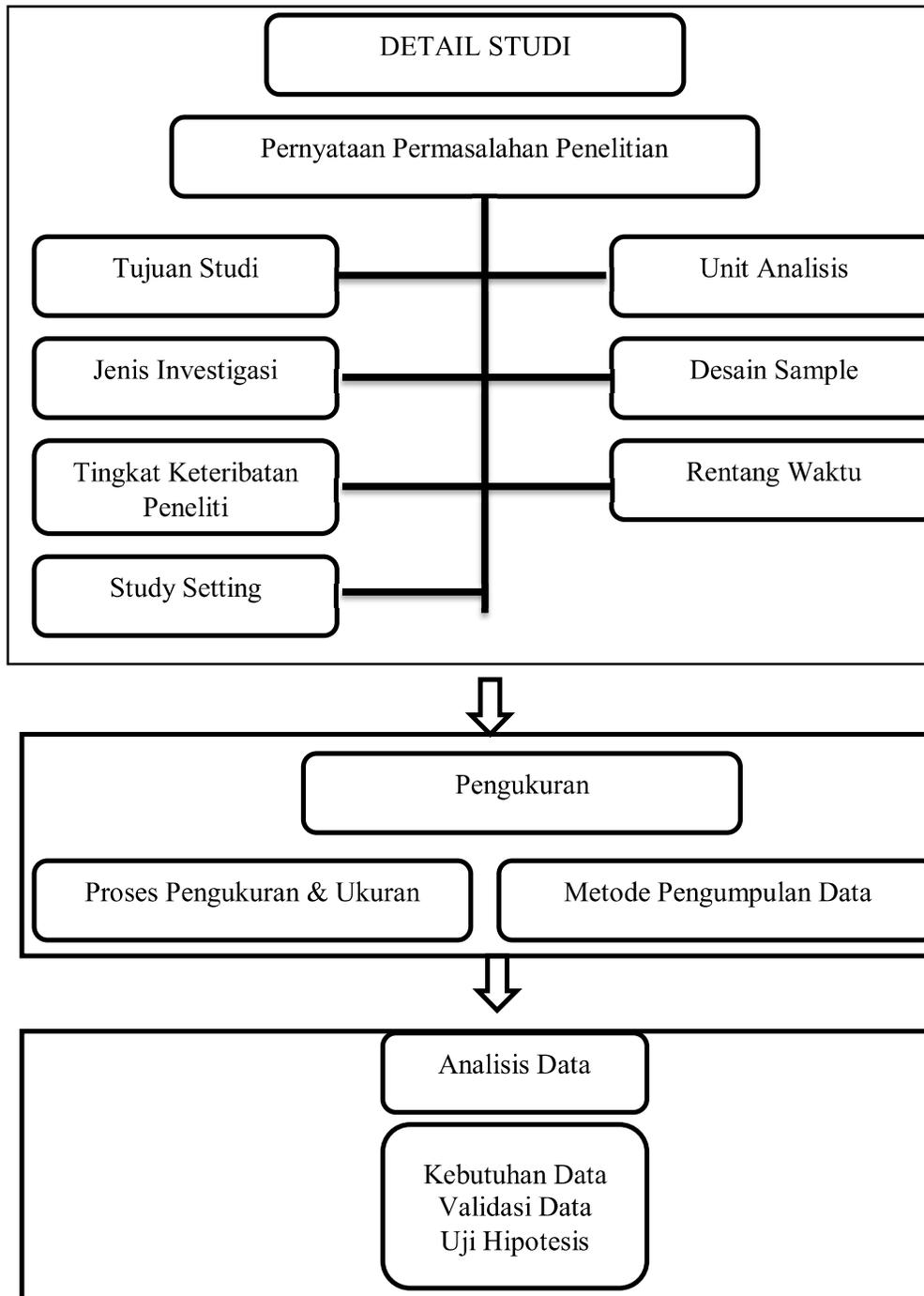
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian adalah pemikiran secara sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Perlu diketahui desain penelitian (*reseach design*) adalah merupakan framework dari suatu penelitian ilmiah. Desain penelitian yang baik akan menjadi penentu keberhasilan serta kualitas suatu penelitian ilmiah. Dengan menyusun desain suatu penelitian, peneliti pada dasarnya memberikan arahan tentang berbagai hal yang harus dilakukan dalam upaya untuk melakukan suatu penelitian ilmiah (Efferin, Darmadji, and Tan 2012:48). Desain penelitian kuantitatif menurut (Efferin, Darmadji, and Tan 2012) dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Desain Penelitian Kuantitatif

3.2. Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada dua jenis variabel penelitian antara lain, variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1. Variabel Bebas (Independen variabel)

Menurut (Sugiyono 2016:39), Variabel Independen/Variabel bebas adalah Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam variabel ini terdapat tiga variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU).

3.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono 2010:28). Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan

jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan.

3.2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah.

Sumber- sumber PAD terdiri dari :

- e. Pajak daerah
- f. Retribusi daerah.
- g. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- h. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

3.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi Umum adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, dana alokasi dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan urusan dan prioritas daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk pemerataan dan keadilan secara selaras demi menggilir kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai penyelenggaraan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pembangunan berkelanjutan.

3.2.2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Menurut (Sugiyono 2016:39), Variabel Dependen/Variabel Terikat adalah Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja modal (Y).

3.2.2.1. Belanja Modal

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga dapat memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Rizky, Agustin, and Mukhlis 2016).

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
5. Belanja modal lainnya

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional	1. Penilaian kinerja perekonomian	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X2)	PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	1. Pajak Daerah 2. Retribusi 3. Hasil ppengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah	Rasio
Dana Alokasi Umum (X3)	DAU adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk <i>block grant</i> yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.	1. Transfer dana pemerintah pusat	Rasio

Belanja Modal (Y)	Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja modal tanah 2. Belanja modal peralatan dan mesin 3. Belanja modal gedung dan bangunan 4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 5. Belanja modal lainnya 	Rasio
-------------------	--	---	-------

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut (Sugiyono 2016:80), definisi populasi adalah populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penelitian diatas, populasi penelitian ini adalah keseluruhan laporan realisasi anggaran kota batam mulai tahun 2012-2016.

3.3.2. Sampel

Menurut (Kuswanto 2012:12) sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Jenis sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode sampling jenuh, menurut (Sugiyono 2016:82) definisi *nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk

dipilih menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu data pertumbuhan ekonomi kota batam, realisasi anggaran pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal di kota Batam (2012-2016).

3.4. Tehnik Pengumpulan Data

3.4.1. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Menurut (Kuswanto 2012:19) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang sudah dikelola oleh pihak lain yang sudah dipublikasikan. Data umumnya berupa bukti historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter).

2. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Seperti yang kita ketahui perpustakaan adalah tempat penyimpanan berbagai macam buku yang telah ditulis oleh orang yang berbeda dan memiliki konsep pemikiran yang berbeda. Maka metode ini dilakukan oleh peneliti untuk membaca dan mempelajari beberapa sumber tertulis yang ada seperti buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, aplikasi dan teori-teori yang menggunakan bahan ini sebagai sumber rujukan dan pembandingan skripsi yang dilakukan.

3.4.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data sekunder

Menurut (Kuswanto 2012:19) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang sudah dikelola oleh pihak lain yang sudah dipublikasikan.

2. Studi Kepuasan (*library research*)

Studi kepuasan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk menyimpulkan dan menghimpun seluruh informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan di diteliti. Hal ini diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan konsep, aplikasi dan teori-teori dan menggunakan bahan ajar sebagai rujukan dan pembanding skripsi yang dilakukan.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2016:147) yang dimaksud analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang besarnya kekuatan variabel bebas (independen) terhadap variabel terkait (dependen). Analisis data ini menggunakan alat bantu program SPSS versi 22.

3.5.1. Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono 2016:147) analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pada statistik deskriptif ini akan dikemukakan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik, maupun diagram lingkaran. Penjelasan kelompok melalui modus, median, mean dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi atau mendeskripsikan dari variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU), serta variabel dependen yaitu belanja modal.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Seperti diketahui bahwa syarat uji regresi dan korelasi adalah data harus memenuhi prinsip BLUE (*best linier unbiased estimator*). Model regresi yang diperoleh dari metode kuadran kecil yang dapat memberikan nilai estimasi atau

perkiraan. Maka untuk memperoleh BLUE ada kondisi atau syarat-syarat minimum yang harus ada pada data. Syarat tersebut bisa kita kenal dengan suatu uji yang disebut uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji ini digunakan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) dari yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan membentuk lonceng, *bell-shaped curve*. Suatu data diketahui tidak normal ketika memiliki nilai yang ekstrim atau biasanya jumlah data terlalu sedikit.

Bagi peneliti yang perlu diperhatikan adalah bahwa uji ini dilakukan jika data memiliki skala ordinal, interval maupun rasio dan menggunakan metode parametrik dalam analisisnya. Jika tidak berdistribusi normal dan jumlah sampel kecil kemudian jenis data nominal atau ordinal maka metode analisis yang paling sesuai adalah non-parametrik.

Dasar pengambilan untuk uji normalitas data adalah:

1. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Didalam persamaan regresi tidak boleh terjadi multikolinearitas, maksudnya tidak boleh ada korelasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Jika pada model persamaan tersebut terjadi gejala multikolinearitas itu berarti sesama variabel bebasnya terjadi korelasi.

Gejala multikolinearitas dapat diketahui melalui suatu uji yang dapat mendeteksi dan menguji apakah persamaan yang dibentuk terjadi gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan atau melihat *tool* uji yang disebut *Variance Inflation Factor* (VIF).

Caranya adalah dengan melihat nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pedoman dalam melihat apakah suatu varian bebas memiliki korelasi dengan variabel bebas yang lain dapat dilihat berdasarkan nilai VIF tersebut.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastitas

Uji ini menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan model regresi tersebut. Menurut (Ghozali 2016:105), uji

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi, dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time series*.

Ada beberapa metode dalam uji autokorelasi diantaranya metode grafik, metode Durbin-Watson, metode runtes dan uji *statistic nonparametic*. Dalam pembahasan kali ini akan digunakan uji autokorelasi dengan menggunakan metode yang paling umum, yaitu metode Durbin-Watson.

Tabel 3. 2 Durbin-Watson

Durbin-Watson	Kesimpulan
< D _L	Terdapat autokorelasi
D _L sampai d _U	Tanpa kesimpulan
d _U sampai dengan 4-d _U	Tanpa kesimpulan tidak terdapat autokorelasi
4-d _U sampai dengan 4-d _L	Tanpa kesimpulan
4-d _L	Ada autokorelasi

Kesimpulan dapat dilakukan dengan asumsidan bantuan dua buah nilai dari tabel Dubin-Watson diatas, yaitu nilai dL dan nilai dU pada K tertentu, K= jumlah variabel bebas dan pada n tertentu, n= jumlah sampel yang digunakan. Kesimpulan ada tidaknya autkorelasi didasarkan pada jika nila Durbin-Watson berada pada range nla dU hingga (4-dU), maka ditarik kesimpulan bahwa model terdapat autokorelasi. Nilai kritis yag digunakan adalah default spss = 5%.

3.5.3. Uji Pengaruh

3.5.3.1. Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda dengan sendirinya menyatakan suatu bentuk hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependennya. Didalam penggunaan analisis ini beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah bentuk dan arah hubungan yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen, serta dapat mengetahui nilai estimasi atau prediksi nilai dari masing-masing variabel independen itu sendiri yang disajikan dalam model regresi.

Model dasar yang digunakan adalah model regresi linier berganda dengan formula sebagai berikut :

Rumus Regresi Linier Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_aX_a$$

Rumus 3. 1

Keterangan : Y = Belanja Modal

X_a = Variabel independen ke - n

a = konstanta

b = Koefisien regresi

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Pendapatan Asli Daerah

X_3 = Dana Alokasi Umum

3.5.4. Uji Hipotesis

Dalam melakukan suatu penelitian, biasanya terdapat dua uji hipotesis yaitu Hipotesis Nul atau sering disebut H_0 dan Hipotesis Alternatif atau sering disebut H_a . Hipotesis penelitian sering disebut juga sebagai hipotesis alternatif, ini merupakan pernyataan dari apa yang diharapkan akan terjadi dan bukan dari apa yang diharapkan tidak akan terjadi. Sedangkan hipotesis nul adalah pernyataan yang menunjukkan tidak ada perubahan atau perbedaan. Pengujian hipotesis yang dilakukan akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Uji hipotesis merupakan uji yang menggunakan data sampel.
- b. Uji menghasilkan keputusan menolak H_0 atau sebaliknya menerima H_0 .

- c. Nilai uji dapat dilihat dengan menggunakan nilai F atau nilai t hitung maupun sign.
- d. Pengambilan kesimpulan dapat pula dilakukan dengan melihat gambar atau kurva, untuk melihat daerah tolak dan daerah terima suatu hipotesis nol.

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah uji signifikansi secara bersama-sama koefisien determinasi (R^2), Uji F dan uji signifikansi parameter individu.

3.5.4.1 Uji Parsial (T-Test)

Menurut (Ghozali 2016:64) Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hipotesis digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. $H_0 : B = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel independen pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen belanja modal.
- b. $H_0 : B \neq 0$.Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen belanja modal.

Kriteria pengujian hipotesis adalah :

- a. H_0 diterima jika $t\text{-tabel} \leq t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$
- b. H_0 ditolak jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

Untuk menentukan besar t-tabel digunakan rumus $\alpha = 5\% : 2$ dengan derajat kebebasan $n-2$ atau $\alpha = 5\% : n-2$, dimana n adalah jumlah responden.

3.5.4.2 Uji Simultan (F-Test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ (α) atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ berarti hipotesis tidak terbukti maka H_0 diterima H_a ditolak bila dilakukan secara simultan.
- b. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α) atau $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ berarti hipotesis terbukti maka H_0 ditolak dan H_a diterima bila dilakukan secara simultan.

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

H_0 = Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Batam.

H_a = Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Batam

3.5.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah nilai yang digunakan untuk melihat sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Dalam data survei (data primer) yang bersifat *cross section* R^2 bernilai 0,2 atau 0,3 dapat dikatakan sudah cukup baik. Sementara untuk data runtut waktu (data skunder atau data *time series*) nilai R^2 akan cenderung lebih besar. Dalam SPSS, nilai signifikansi uji F dilihat pada output anova, sementara untuk nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada output model summarinya.

3.6. Lokasi dan jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik Kota Batam (BPS Batam) dan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

3.6.2. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2018																					
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Penentuan Topik	■	■																				
2	Judul			■																			
3	Bimbingan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Pengajuan Surat Penelitian					■	■	■	■	■	■	■	■										
5	Pengumpulan													■	■	■	■						

